

**PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN DI KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK
(STUDI KASUS TANAMAN PADI)**

Oleh :
Muhammad Gustain
gustainm@yahoo.com

Pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri, MS

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

So that the problem in this case is How the security improvement program implementation in District Sabak Auh Siak in rice plants and Is factors that affect the implementation of the security improvement program in the District of Sabak Auh Siak in rice plants. From the results of research conducted on the Implementation of the Program for Increasing Food Security in the district of Sabak Auh Siak there are some identification problems that occur in rice crops in the district of Sabak AUH include: The transformation of land in the district of Sabak Auh obviously very big influence on the target surplus in Siak. Where formerly Siak a granary and the largest producer of rice in Riau which is 40,000 tons per year, but since the land use surplus is reduced, which in the year 2013 and only a 2000 tons only, absence of irrigation facilities in the district of Sabak Auh that resulting in reduced production of rice in Siak, Help tracktor from Siak district government that is not appropriate allocation, which should each farmer group get 2-3 tractors actually only got one machine tracktor.

From the description above, the researcher is interested to take the title on the effect of "Food Security Enhancement Program Implementation in District Sabak Auh Siak (Case Study of Rice)".

Keywords: Implementation, Program Improvement, Food Security

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Ketahanan Pangan telah menghendaki adanya ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga di Kecamatan Sabak Auh. Dalam arti setiap penduduk dan rumah tangga mampu untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup. Permasalahan aspek produksi diawali dengan ketidakcukupan produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan produksi pangan yang relatif lebih lambat dari pertumbuhan permintaannya. Permasalahan ini akan berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan. Ketersediaan bahan pangan bagi penduduk akan semakin terbatas akibat kesenjangan yang terjadi antara produksi dan permintaan. Selama ini, permasalahan ini dapat diatasi dengan impor bahan pangan tersebut. Namun, sampai kapan bangsa ini akan mengimpor bahan pangan dari luar, Karena hal ini tidak akan membuat bangsa ini berkembang. Sebaliknya akan mengancam stabilitas ketahanan pangan di Indonesia dan juga mengancam produk dalam negeri.

Aspek selanjutnya yaitu aspek distribusi. Permasalahan di dalam pembangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke konsumen di suatu wilayah. Distribusi adalah suatu proses pengangkutan bahan pangan dari suatu tempat ke tempat lain, biasanya dari produsen ke konsumen.

Hampir 40-50% perekonomian kabupaten Siak

bersumber dari sektor pertanian, sehingga pembangunan di bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian, guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan, serta sekor-sektor lainnya. Berbagai program yang telah dilakukan di Kabupaten Siak diantaranya:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- c. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- e. Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan
- f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

Dalam hal ini perkembangan pertumbuhan produksi beras di Kabupaten Siak makin menurun dari sejak tahun 2011 sampai sekarang penghasilan padi semakin memburuk yang dahulunya Kabupaten Siak menjadi salah satu lumbung penghasilan beras di Riau Hampir 30%-45% hasil produksi beras berasal dari Kabupaten Siak sehingga pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian dapat mendorong/menopong disektor industri dan sektor perdagangan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Siak akan bekerja dan ***berusaha mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap di Kecamatan Sabak Auh*** melalui tugas dan fungsinya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai

pada aspek evaluasi. Kecamatan Sabak Auh memiliki potensi pada sektor pertanian khususnya tanaman padi, jika seandainya pemerintah mampu mengoptimalkan potensi pertanian padi dikecamatan Sabak Auh bukan tidak mungkin hal ini akan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi melalui sektor pertanian di kabupaten Siak.

Permasalahan pertanian yang dihadapi Kabupaten Siak berdampak pada permasalahan ketahanan pangan merupakan masalah yang sangat *urgent* untuk dapat diselesaikan, alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan yang saat ini terjadi adalah akibat dari maraknya konversi tersebut. Para petani diharapkan untuk tidak mengalihfungsikan areal sawah yang saat ini terus digarap untuk kepentingan lain diluar produksi padi. Jika hal demikian terus dilakukan, maka dalam jangka panjang alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan itu jelas akan mengancam ketahanan pangan di Siak.

Program dalam penelitian ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah Kabupaten Siak dalam menanggulangi permasalahan alih fungsi lahan di Kecamatan Sabak Auh. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tanaman padi di Kecamatan sabak Auh memiliki permasalahan yang kompleks dan harus diselesaikan. Terutama pada

permasalahan panen yang hanya 1 x dalam setahun. Permasalahan alih fungsi lahan yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sehingga sangat sulit diatasi. Berikut ini adalah jumlah besaran alih fungsi lahan di Kecamatan Sabak Auh dari kurun waktu tahun 2009-2016` yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.I
Luas lahan Padi ke Kecamatan Sabak Auh 2009-2016

No	Kampung	Luas Lahan (Ha)			
		Tahun			
		2009/ 2011	2012/ 2013	2014/ 2015	2016
1.	Sungai Tengah	520	480	480	419
2.	Belading	630	580	450	316
3.	Bandar Pedada	75	50	50	27
4.	Laksamana	500	344	250	237,5
5.	Rempak	50	88	75	70
6.	Selat Guntung		117	75	75
Jumlah		1775	1659	1380	1144.5

Sumber data: UPTD tanaman Pangan dan Holtikultural Kecamatan Sabak Auh tahun 2016

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun luas lahan padi di Kecamatan Sabak Auh mengalami penurunan luas lahan dimana pada tahun 2009-2011 luas lahan 1775 ha dan pada 2012-2013 luas lahan menjadi 1659 artinya alih fungsi lahan yang terjadi sekitar 116 Ha dan pada tahun 2014-2015 luas lahan 1380 artinya alih fungsi lahan yang terjadi sekitar 395 ha, pada tahun 2016 luas lahan 1144,5 artinya

alih fungsi lahan terjadi sekitar 235,5 ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2009-2016 adalah 746,5 ha.

Pemerintah Kabupaten Siak juga telah menerapkan program untuk mengelola kebutuhan rumah tangga sendiri. Dimana masyarakat atau petani tidak termasuk kebutuhan rumah tangga. Program pertanian Padi menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sabak Auh. Kuncinya bagaimana memanfaatkan sumberdaya dan teknologi dalam memanfaatkan sentra-sentra pertanian unggulan. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui gerakan ini dapat memenuhi produksi beras dan swasembada pangan.

Dalam mewujudkan swasembada berkelanjutan dan sasaran produksi tanaman pangan, Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menempuh langkah melalui catur strategi tanaman pangan di antaranya peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi dan penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Makanya Pemerintah harus mulai intens membina petani dan mengajak kembali melakukan penanaman padi melalui cetak sawah dan pemberian berbagai teknologi pendukung peningkatan produksi. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang terjadi pada tanaman padi di kecamatan Sabak Auh diantaranya:

1. Alih fungsi lahan di Kecamatan Sabak Auh jelas sangat berpengaruh besar terhadap target surplus beras

di Siak. Dimana dahulunya Kabupaten Siak salah satu lumbung padi dan penghasil beras terbesar di Riau yakni 40.000 Ton pertahun, namun sejak terjadinya alih fungsi lahan surplus beras tersebut berkurang, dimana pada Tahun 2013 lalu hanya tinggal 2000 Ton saja.

2. Tidak adanya sarana irigasi di Kecamatan Sabak Auh yang mengakibatkan berkurangnya produksi padi di Kabupaten Siak.
3. Bantuan *Tractor* dari Pemerintah Kabupaten Siak yang tidak sesuai peruntukannya, yang seharusnya setiap kelompok tani mendapatkan 2-3 mesin traktor justru hanya mendapat 1 mesin *tractor*.
4. Masih kurangnya segala peralatan dan kebutuhan penunjang pertanian yang modern dari Pemerintah Kabupaten Siak untuk peningkatan hasil produksi padi yang diinginkan.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang pengaruh "***Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Kasus Tanaman Padi)***".

METODE PENELITIAN

penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Siak, dengan situs di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural, UPTD Pertanian Kecamatan Sabak Auh, Kantor UPTD Tanaman Pangan dan Hortikultural kecamatan Sabak Auh.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Upaya-Upaya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak menyalurkan bantuan melalui program PDMP (Pengembangan Desa Mandiri Pangan). Adapun kegiatan pengembangan desa mandiri pangan dilaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pertanian Padi di Kecamatan Sabak Auh Desa Belading. Dalam mewujudkan daerah yang memiliki penghasilan produksi padi yang maju dan lumbung produksi yang terbesar, Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan petani agar pelaksanaan pertanian dan hasil produksi tanaman meningkat.

Pemerintah melaksanakan bantuan pertanian melalui program pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Pertanian Padi, tujuan program ini untuk pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah, pengembangan sistem ketahanan pangan, peningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan maupun untuk mensejahterakan para petani.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan dengan memberdayakan masyarakat agar terus menghidupkan semangat petani, agar mampu mengatasi masalah pangan secara mandiri, serta dapat mewujudkan daerah lumbung produksi padi yang lebih banyak dalam peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan produktifitas, produksi dengan pendapatan yang baik melalui usaha tani maupun usaha lainnya:

kecamatan Sabak Auh merupakan salah satu kecamatan dengan luas lahan padi terbesar nomor 2 setelah bunga raya akan tetapi tingginya alih fungsi lahan menjadikan sebagian sawah di kecamatan Sabak auh berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Dengan masa tanam yang dilakukan sekali setahun sebenarnya sangat disayangkan apabila sejauh ini pemerinah tidak melakukan upaya peningkatan program pertanian yang sama seperti yang dilakukan di kecamatan Bungaraya, karena kecamatan Sabak Auh memiliki potensi yang sama untuk membangun perekonomian dikabupaten Siak terkhusus pada sektor pertanian.

3. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Pemberdayaan penyuluhan pangan lapangan adalah bentuk pemerintah adalah sebagai penyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara

berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau Peredaran Pangan oleh pelaku usaha pangan (petani). Dengan adanya pemerintah menyediakan petugas Penyuluh petani lapangan (PPL) untuk membantu petani dalam pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi tentang pengetahuan wawasan bercocok tanam maupun ketersediaan pangan.

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak Kabupaten Siak membuat kebijakan mengadakan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dengan menurunkan anggota penyuluhan tanaman pertanian kelapangan disetiap Kecamatan, dan seluruh desa yang ada di Kabupaten Siak. Namun jumlah tenaga PPL saat ini baru mencapai 70 orang, sementara dari jumlah tersebut tidak sebanding dengan luasnya lokasi.

4. Program ketersediaan pangan (beras)

Indonesia bahan makanan pokok salah satunya adalah beras, karena mengandung sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak berusaha mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup, dan menjadikan daerah penghasil beras terbaik. Landasan hukum yang mendukung tentang

kebijakan ketersediaan pangan tercantum pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 18.Tahun 2012 tentang Pangan bagian BAB IV Ketersediaan Pangan , Pasal 15 yang berbunyi; (1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan. (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.

5. Program Gerakan Pangan Beragam, Bergizi, dan Berimbang

Program Gerakan Pangan Beragam, Bergizi, dan Berimbang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana mana di amanatkan pada Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam mengoptimalisasikan ketersediaan pangan Tahun 2015

1. Faktor Komunikasi

a. Tranmisi
Seringkali terjadinya masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (mis kommunikasi) yang

disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi.

- b. Kejelasan kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi kebijakan tersebut. Tetapi dalam kenyataan yang diakui oleh salah satu petani terhadap diakui yang namanya kejelasan sosialisasi dan penyuluhan tanaman pangan dikarenakan belum meratanya sosialisasi.

- c. Konsistensi Arus komunikasi yang terjadi harus tegas dan jelas. Bila tidak, maka akan terdapat kelonggaran bagi para pelaksana untuk menafsirkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, perlu dihindari adanya suatu hal yang dapat menimbulkan suatu kegaduhan, kebingungan diantara para pelaksana sebagai akibat dari adanya kelonggaran dalam menafsirkan.

2. Faktor Sumberdaya

a. Staff

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya

manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Pemerintah menrencanakan petugas yang berkualitas, dalam hal ini dimaksudkan anggota petugas PPL di lakukan yang memiliki potensi sesuai dengan SDM yang dimilikinya, adapun petugas PPL berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Pertanian yang berpengalaman dan tamatan D3, S1, dan SMA. Dalam hal ini staaf atau anggota PPL berasal dari tamatan pendidikan.

b. Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Anggaran yang diberikan pemerintah dalam hal ini berbeentuk bantuan pertanian. Hal ini, penulis lebih menayakan khusus tentang ketersediaan pangan

dalam bentuk peningkatan produksi padi kepada pihak yang terkait. Anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Siak diantaranya pemerintah memberi bantuan kepada petani ada yang berupa lahan maupun modal. Modal yang di berikan bukan saja dalam bentuk uang, tapi berupa pupuk, pepsida, gabah, alat perontok, bajak, dan lainnya. Bantuan ini, akan dibagikan disetiap Kecamatan, berdasarkan daerah yang memiliki pontensi tanaman padi yang lebih bepontensi maupun menghasilkan.

c. Kewenangan

Kewenangan berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dillaksanakan.

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura memiliki kewenangan untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah.

d. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan

perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

3. Faktor Disposisi

Alih fungsi lahan di Kabupaten Siak Berdasarkan isi undang-undang Nomor 41 tahun 2009 Pasal 44 ayat 1, Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. maka Kabupaten Siak yang merupakan salah satu penghasil lumbung padi terbesar di Riau, memiliki daerah yang berpotensi dalam tanaman penghasil padi. Kabupaten Siak banyak melakukan pengalihan fungsi lahan diantaranya, Pertanian padi keperkebunan Kelapa sawit dan pembangunan sarang burung wallet yang banyak terjadi sampai saat ini.

Meskipun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan telah ada sejak tahun 2009 dan beberapa Peraturan Pemerintah lainnya seperti PP No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP No 25 Tahun 2012 tentang Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam hal ini tanaman pangan perlu memperkuat basis ketahanan pangan untuk mengatasi semakin menciutnya jumlah lahan produksi. Jumlah

petani tanaman pangan secara nasional sudah menurun, termasuk termasuk di kabupaten Siak. Buktinya, lahan seluas dua hektar yang dimiliki per kepala keluarga kini tinggal satu hektar akibat alih fungsi lahan ke perkebunan, bahkan ada yang habis sama sekali.

KTNA selaku mitra petani dan pemerintah agar petani mendapatkan program pendukung kegiatan pertanian. Agar basis ketahanan pangan dapat bertahan, perlu adanya subsidi harga gabah dan sistem tata niaga yang menguntungkan petani dari pemerintah. Karena, petani adalah kunci ketahanan pangan agar selalu kuat. Mengingat jumlah petani semakin berkurang, Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura (BPPH) Kabupaten Siak harus membuat terobosan penyelamatan lahan pertanian tanaman pangan. Ini sangat perlu dilakukan mengingat Kabupaten Siak memiliki beberapa daerah sentra tanaman pangan seperti, Kecamatan Bunga Raya, Sabak Auh, sungai Mandau, dan Sungai Apit.

4. Factor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh

terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

KESIMPULAN

1. Upaya-Upaya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak menyalurkan bantuan melalui program PDMP (Pembangunan Desa Mandiri Pangan). Adapun

kegiatan pengembangan desa mandiri pangan dilaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pertanian Padi di Kecamatan Sabak Auh Desa Belading. Tujuan program ini untuk pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah, pengembangan sistem ketahanan pangan, meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan maupun untuk mensejahterakan para petani.

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dengan masa tanam yang dilakukan sekali setahun sebenarnya sangat disayangkan apabila sejauh ini pemerintah tidak melakukan upaya peningkatan program pertanian yang sama seperti yang dilakukan di Kecamatan Bungaraya, karena kecamatan Sabak Auh memiliki potensi yang sama untuk membangun perekonomian di kabupaten Siak terkhusus pada sektor pertanian.

c. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Pemberdayaan penyuluh pangan lapangan adalah bentuk pemerintah sebagai penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses

produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau Peredaran Pangan oleh pelaku usaha pangan (petani).

Pendapat diatas menjelaskan bahwa kurangnya anggota pemberdayaan penyuluhan lapangan PPL dalam melaksanakan pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi sehingga program pemberdayaan penyuluhan lapangan (PPL) tidak dapat terlaksana secara sempurna. Padahal program PPL merupakan program pendukung untuk membangkitkan kemampuan petani.

d. Program ketersediaan pangan (beras)

Indonesia bahan makanan pokok salah satunya adalah beras, karena mengandung sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak berusaha mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup, dan menjadikan daerah penghasil beras terbaik. Landasan hukum yang mendukung tentang kebijakan ketersediaan pangan tercantum pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 18.Tahun 2012 tentang Pangan bagian BAB IV Ketersediaan Pangan , Pasal 15 yang berbunyi; (1)

Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan. (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain. Pemerintah Kabupaten Siak dalam program analisis ketersediaan padi maupun beras adalah menjadi fokus yang pertama dalam mengelola aset daerah dan mewujudkan kembali swasembada padi yang berkecukupan, mampu menopong kebutuhan ekonomi daerah.

1. Program Gerakan Pangan Beragam, Bergizi, dan Berimbang

Program Gerakan Pangan Beragam, Bergizi, dan Berimbang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana mana di amanatkan pada Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

2. Faktor yang mempengaruhi upaya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam

mengoptimalkan ketersediaan pangan Tahun 2015

1. Faktor Komunikasi

Sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui tentang peningkatan hasil produksi padi dalam ketersediaan pangan dan memahami maksud dan tujuannya, sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi mengkonversi lahan pertaniannya. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terutama para pemilik lahan pertanian dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan. Dengan itu semua diharapkan masyarakat mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencentak lahan tanman padi seandainya ada pihak-pihak yang ingin membeli lahan pertaniannya untuk dikonversikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan lainnya sedangkan Materi sosialisasi disamping tentang perlindungan lahan pertanian, juga tentang dampak dari konversi, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Sehingga dapat menyadarkan masyarakat bahwa konversi lahan pertanian merugikan baik dari segi ekonomi, sosial maupun dari sudut pandangan lingkungan

2. Faktor Sumberdaya

Ketersediaan Sumber daya manusia yang mempunyai Kompetensi dan kapabilitas untuk menjalankan system manajemen pengelolaan lahan pangan yang

direncanakan, dalam hal ini menjadi suatu kebutuhan yang nyata, Sumber daya manusia ini meliputi tenaga-tenaga operasional lapangan, para analisis, dan pengambil keputusan yang berkaitan dengan manajemen sumberdaya lahan terutama lahan pertanian padi.

Petugas dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar dapat efektif. Yaitu kemampuan petugas dalam memahami kebijakan dan keahlian yang dimilikinya.

1. Staff

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

2. Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan

anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Kewenangan

Kewenangan berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura memiliki kewenangan untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah.

4. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

3. Faktor Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik

harus memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh si pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Agar basis ketahanan pangan dapat bertahan, perlu adanya subsidi harga gabah dan sistem tata niaga yang menguntungkan petani dari pemerintah. Karena, petani adalah kunci ketahanan pangan agar selalu kuat. Mengingat jumlah petani semakin berkurang, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (BKP) Kabupaten Siak harus membuat terobosan penyelamatan lahan pertanian tanaman pangan. Ini sangat perlu dilakukan mengingat Kabupaten Siak memiliki beberapa daerah sentra tanaman pangan seperti, Kecamatan Bunga Raya, Sabak Auh, sungai Mandau, dan Sungai Apit.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak bekerja dan berusaha mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap di Kabupaten siak melalui tugas dan fungsinya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada aspek evaluasi. Disamping itu upaya pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, pelatihan serta

penyuluhan akan terus dikembangkan.

SARAN

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak, mengupayakan ketersediaan pangan di sektor swasembada produksi padi dengan mengadakan program-program yang dapat terjangkau oleh masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani antara lain yaitu:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dapat terlaksana dengan baik terutama di Kecamatan Sabak Auh.
2. Ketahanan Pangan di Kecamatan Sabak Auh dapat meningkat Secara Signifikan.
3. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat memberikan kontribusi dengan baik dalam menahan gempuran Alifungsi Lahan di Kabupaten Siak terutama Kecamatan Sabak Auh.
4. Ketersediaan pangan (beras) yang cukup di Kecamatan Sabak Auh
5. Program gerakan pangan beragam, bergizi, dan berimbang dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James. (1960). *Public Policy Making, dikutip oleh Budi Winarno. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- AG Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal.21.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri.2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. .
- C. Jones, 1999, *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press,
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- S Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Nugroho Riant, 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Said Zainal Abidin. 2002. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Pancur Sawiah.
- S.A. Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2008, hal.21.
- Kusumanegara Solahuddin, 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Siagian, Sondang P. 2001 *Managemen Strategik*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset. 2003.
- Wiliam Dunn 1999. *Pengantar Analisis Kbijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

DOKUMENTASI

Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.